

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN
KONDISI GEOGRAFIS DAERAH TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA.**



OLEH :

Pramudya Mulia Zidanta 19312294

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS & EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN
KONDISI GEOGRAFIS DAERAH TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA.**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

OLEH :

Pramudya Mulia Zidanta 19312294

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS & EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

" Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya penelitian yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi pada skripsi ini. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup dan akan menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 02 Januari 2023

Penulis

A red 3000 Rupiah postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "METERAI TEMPEL" and "3000". The serial number "2PADFAKX215991566" is visible at the bottom of the stamp.

(Pramudya Mulia Zidanta)

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN
KONDISI GEOGRAFIS DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI INDONESIA.**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Nama : **Pramudya Mulia Zidanta**

NIM : **19312294**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 03 Januari 2023

Dosen Pembimbing



(Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak., CMA., CA.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Kondisi Geografis Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

Disusun oleh : PRAMUDYA MULIA ZIDANTA

Nomor Mahasiswa : 19312294

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Jum'at, 03 Februari 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Mahmudi, Dr., M.Si., CMA.

Penguji : Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D.,
CFra.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFra., CertIPSAS.



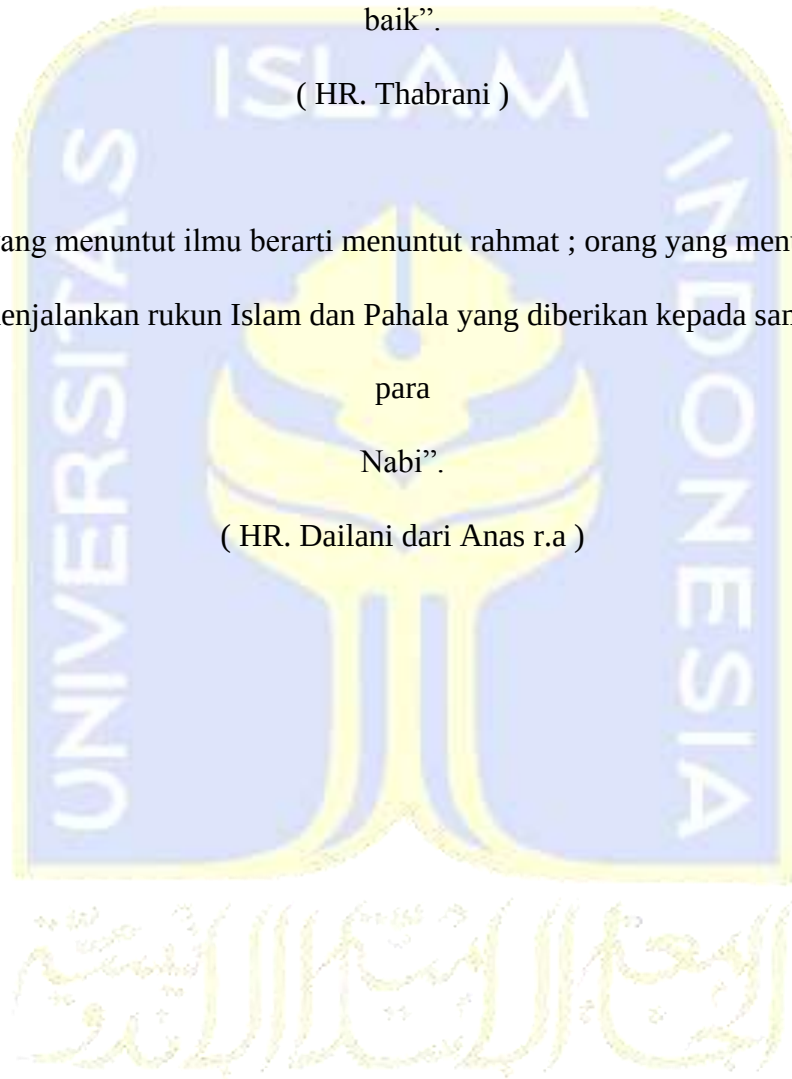
HALAMAN MOTTO

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”.

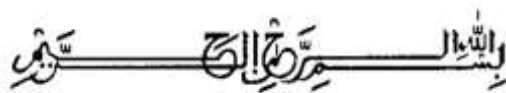
(HR. Thabrani)

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan para Nabi”.

(HR. Dailani dari Anas r.a)



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur bagi Allah SWT, atas berkat rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman yang telah membawa dan menyebarkan ajaran Islam sebagai rahmatan lil' alamin. Penelitian berjudul *“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN KONDISI GEOGRAFIS DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA”*. disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang senantiasa mencintai hamba-Nya dengan memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan, serta menjawab setiap doa hamba-Nya dalam menjalani keseharian sebagai seorang muslim yang berjuang menuntut ilmu di jalan-Nya. Penulis sangat bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan, Ya Rabb.

2. Nabi Muhammad SAW, yang selalu merindukan ummatnya, suri tauladan bagi seluruh umat di muka bumi. Semoga keteladanan beliau akan terus menjadi pedoman bagi penulis untuk memperbaiki diri dengan menjalani kehidupan sebagai seorang muslim, dan calon pemimpin di masa mendatang.
3. Bapak Iptu.Suyono dan Ibu Suci Kurniawati S.H. yang telah menjadi relawan kehidupan penulis sejak masa kelahiran hingga detik ini dan tentu terus menerus menjadi alasan semangat kehidupan serta kerja keras penulis. Terima kasih sudah mengajarkan arti perjuangan serta semangat untuk bertahan serta mendidik penulis dalam banyak hal kehidupan, dan menjadi salah satu teladan bagi penulis dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah SWT senantiasa memberi keluarga kita kesehatan, kebahagiaan dan selalu dalam ridho-Nya.
4. Karinda Bethari Suni selaku kakak kandung penulis. Terimakasih sudah selalu menjadi saudara yang menyenangkan dan memberi keseruan dalam menjalani hidup bagi penulis, semoga bisa selalu akur dan saling memberikan support hingga waktu yang tidak dapat dipastikan.
5. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak., CMA., CA. selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Salah satu guru yang mengajarkan penulis tentang menjadi seorang pribadi yang memiliki karakter dan pandangan yang luas akan suatu hal. Terimakasih sudah membimbing penulis dalam dunia perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi. Semoga kesehatan dan Ridho-Nya akan selalu diberikan kepada bapak beserta keluarga.

6. Bapak Johan Arifin, S.E, M.Si., Ph.D. selaku Dekan prodi akuntansi serta segenap jajaran pimpinan fakultas Prodi Akuntansi FBE UII atas segala ilmu yang penulis peroleh.
7. Semua Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta yang telah membimbing dan mengajar penulis selama proses belajar dibangku kuliah.
8. Annas Kurniawan, Saphira Pricilia, Kamelia Hafid, selaku sahabat dari awal kuliah hingga saat ini, semoga persahabatan ini langgeng sampai maut yang memisahkan. Terimakasih selalu memberikan suport dan motivasi bagi penulis untuk terus bersemangat dalam menjalani hidup.
9. Chrisanda Ferdinan, M.Fadhil Zidan, Windy Astusi P., Amalina Mutiara A., Salma Herysni, Sonia Dewi A., selaku sahabat penulis yang hampir setiap hari menemani penulis untuk beraktifitas selama dijogja dan klaten. Terimakasih selalu ada dan sudah menjadi sahabat yang sangat berkesan bagi penulis.

Wassalamualaikum wr.wb

Penulis,

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN MOTTO	ii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.2 Hipotesis Penelitian	19
BAB III.....	24
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	24
3.2 Jenis Data dan Sumber Data	24
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	25
3.4 Analisis Data	27
BAB IV	32
4.1 Analisis Statistik Deskriptif	32
4.2 Uji Asumsi Klasik	34
4.3 Hasil Analisis Regresi Berganda	38

4.4	Pembahasan	43
BAB V		50
5.1	Kesimpulan	50
5.2	Manfaat Penelitian	52
5.3	Keterbatasan Penelitian	53
5.4	Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA		54
LAMPIRAN		58



DAFTAR LAMPIRAN

lampiran 1	58
lampiran 2	59
lampiran 3	66



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	32
Tabel 4.2.....	35
Tabel 4.3.....	36
Tabel 4.4.....	38
Tabel 4.5.....	38
Tabel 4.6.....	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	31
Gambar 2.....	37



ABSTRAK

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih digunakan sebagai acuan penentu kualitas kehidupan manusia dalam pemerindahan daerah, peningkatan serta penurunan nilai tentu dipengaruhi oleh berbagai aspek yang melatar belakangi. Pemerintahan daerah, pusat bahkan dunia pun memiliki permasalahan yang sama dalam mencapai target IPM setiap tahunnya. Sampel penelitian ini menggunakan 34 Provinsi di Indonesia. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan Ketinggian Wilayah tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan demikian pemerintah provinsi diharapkan dapat mempertimbangkan program serta upaya yang dapat meningkatkan kualitas dan nilai indeks pembangunan manusia baik melalui segi ekonomi maupun sosial.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Jumlah Penduduk, Ketinggian Wilayah, Indeks Pembangunan Manusia.

ABSTRACT

The Human Development Index (HDI) is still used as a reference for determining the quality of human life in regional beautification, increases and decreases in value are certainly influenced by various underlying aspects. Regional, central and even world governments also have the same problem in achieving the HDI target every year. This research sample uses 34 provinces in Indonesia. The results of the regression analysis show that Regional Original Income has a significant positive effect on the human development index, Capital Expenditures and Total Population have a significant negative effect on the human development index, while Regional Altitude has no significant effect on the human development index. Thus the provincial government is expected to consider programs and efforts that can improve the quality and value of the human development index both from an economic and social perspective.

Keywords: Local Own Revenue, Capital Expenditure, Total Population, Altitude, Human Development Index.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan suatu Negara dapat diukur berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dimana tujuan berdirinya suatu negara adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat oleh pemerintahan yang mengatur serta mengelola secara aspirati dan progresif sesuai dengan kepentingan masyarakat (Suhardin, 2007).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan standar yang berbeda-beda (indikator subjektif), sedangkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan pemerintah (belanja modal), dan pendapatan daerah merupakan indikator objektif, dimana aspek tersebut menjadi Indikator ekonomi, yang diukur secara objektif yang dimana biasanya menggunakan indikator berbasis moneter, kini lebih berperan dalam perkembangan pemerintah. Namun, penilaian ini diyakini tidak cukup untuk menggambarkan secara akurat tingkat kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya. Menggunakan standar yang sama (indikator objektif) atau standar yang berbeda (indikator subjektif) dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial yang sebenarnya.

Perkembangan tata kelola pembangunan daerah kini tengah diupayakan oleh pemerintah yang ditandai oleh perubahan yang mendasar dari 3 aspek, yaitu aspek

politik, sosial, serta ekonomi. Aspek politik menandakan semakin kuatnya kewenangan daerah dalam menentukan berbagai kebijakan di daerah, sedangkan adanya kebijakan transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang semakin besar dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah sebagai aspek ekonomi, dimana Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang didapatkan dan diolah oleh pemerintah yang didapatkan dari beberapa sumber pendapatan yang ditarik berdasarkan undang undnag yang berlaku. Fungsi manajemen pemerintah pusat dan manajemen keuangan pemerintah daerah terkait erat dengan pendelegasian wewenang ini kepada pemerintah daerah provinsi (Sriyana, 2011), dan kesejahteraan penduduk juga menjadi faktor dalam pembangunan ini. Hal ini sesuai dengan No. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 33 Tahun 2004. Undang-undang ini bertujuan untuk menutup kesenjangan keuangan yang ada antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (vertical balanced), menutup kesenjangan keuangan yang terjadi antar wilayah (horizontal balanced), dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan sektor publik dan peningkatan kualitas pelayanan.

Belanja modal merupakan komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap (Mawarni & Abdullah, 2013). Belanja modal sangat berhubungan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal tersebut. Dimana aspek tersebut berkaitan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sumber pembiayaan yang penting bagi pemerintah daerah dan mempunyai komponen yaitu penerimaan yang bersumber dari

pendapatan pajak, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta PAD lain yang sah. Meningkatnya PAD akan menciptakan perbaikan terhadap kondisi daerah, akuntabilitas, dan juga dapat memperkecil sumber pendanaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah dibawahnya ditentukan berdasarkan pertimbangan ekonomi, begitupun keputusan terhadap tata pelaksanaan program ekonomi (Abdullah, 2006).

Kondisi geografis setiap wilayah Provinsi di Indonesia yang dipengaruhi letak geografisnya memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat penduduknya, yaitu dengan munculnya keanekaragaman mata pencaharian, tradisi, budaya serta adat istiadat, dan aspek kehidupan sosial lainnya. Pembangunan sosial ekonomi yang juga mencerminkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah yang diharapkan mampu mewujudkan upaya yang dilakukan pemerintah. Sebagai wilayah yang disebut negara, dihuni oleh penduduk yang hidup dan tinggal didalamnya, ukuran jumlah penduduk yang ada juga termasuk dalam aspek pendukung dalam kualitas pembangunan dalam suatu negara, banyak sedikitnya, serta baik buruknya kualitas penduduk (SDM) menjadi tanggung jawab oleh pemerintah dalam program pembangunannya yang dimana hal tersebut akan menopang kualitas pembangunan yang ada.

Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat tercapai apabila pertumbuhan ekonomi suatu kawasan dapat meningkatkan produktifitasnya. Dimana ekonomi dalam konteks berbangsa dan bernegara memiliki peranan serta

kedudukan yang sangat krusial. Berbagai macam teori kebijakan ekonomi diterapkan dalam rangka upaya pencapaian tujuan kehidupan bersama yang diterjemahkan sebagai kesejahteraan hidup, pencapaian tujuan pembangunan manusia ini bukan hal yang baru lagi bagi pemerintahan Indonesia, yakni pemenuhan pendidikan universal, peningkatan taraf kesehatan, dan pemberantasan kemiskinan. Menurut (Sriningsih, 2013) pada dasarnya, otonomi daerah merupakan salah satu upaya pemberdayaan oleh pemerintah dalam rangka proses pembangunan.

Perekonomian yang matang menjadi sebuah instrumen tolak ukur kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sebuah negara. Indonesia menghadapi persaingan kualitas SDM yang semakin ketat. namun dibalik semua itu kualitas SDM Indonesia saat ini masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Tercatat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diterbitkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), peringkat IPM indonesia masih jauh tertinggal jauh dengan beberapa negara ASEAN. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM Indonesia masih rendah. Selain dilihat dari IPM, kualitas perekonomian juga dapat diukur dari pendapatan daerah serta pengelolaan daerahnya yang ada di setiap wilayahnya, untuk meningkatkan IPM tidak semata-mata hanya pada pertumbuhan ekonomi, namun pembangunan dari segala aspek pendukung juga (Sarkoro, 2016). Setiap provinsi Indonesia memiliki nilai pendapatan yang berbeda, kemudian di setiap provinsi Indonesia juga memiliki jumlah pengeluaran yang berbeda pula.

Penelitian ini menggunakan obyek pemerintahan Provinsi di Indonesia, Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Kondisi Geografis Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”.



1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia berpengaruh terhadap Indeks Pemabangunan Manusia?
- b. Apakah Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
- c. Apakah Kondisi Geografis Daerah Provinsi di Indonesia berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- b. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- c. Pengaruh Kondisi Geografis Daerah Provinsi di Indonesia terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah:

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa menjadi masukan untuk perencanaan pembangunan, serta perencanaan program pemerintah dan kebijakan strategis pada bidang sosial

terutama terfokus pada kesejahteraan masyarakat di setiap Provinsi di Indonesia. Selain itu juga dapat digunakan untuk pertimbangan bagi pemerintah provinsi terkait pemanfaatan PAD dan Belanja Modal untuk alokasi program masyarakat.

b. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi untuk perkembangan ilmu akuntansi dan juga dapat menambah kajian ilmu akuntansi dalam Akuntansi Sektor Publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan serta kajian skripsi adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memberikan penjelasan tentang asal mula masalah, rumusan, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, membahas tentang teori-teori yang mendasari dan mendukung penelitian ini, serta penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian, dan kerangka kerja.

Bab III : Metode penelitian

yang meliputi populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian, dan analisis data, diuraikan dalam bab ini.

Bab IV: Analisis dan Pembahasan Data

Bab ini membahas tentang deskripsi data spesifik yang dapat digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan penelitian dengan menyelesaikan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dengan menggunakan alat dan prosedur analisis.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan merangkum temuan penelitian, kekurangan, dan rekomendasi untuk berbagai pihak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu daerah atau negara, yang dimana pada pengukurannya akan mengkombinasikan beberapa pencapaian pada bidang sosial tertentu. Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia, dimana konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas baik dilihat dari sudut pandang sosial maupun ekonomi. UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu pemerataan (*equity*), produktivitas (*productivity*), pemberdayaan (*empowerment*), dan kesinambungan (*sustainability*) (Ardiansyah & Widyaningsih, 2014). Dalam konsepnya, pembangunan seharusnya dianalisis serta dapat dipahami dari sudut manusianya bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya saja melainkan juga dilihat dari aspek pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup disaat lahir; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah dirubah menjadi prioritas daya beli.

Nilai indeks ini berkisar antara skala 0-100, apabila nilai semakin mendekati angka 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan

manusia yang baik dan optimal (Zufaldhly, 2018). Agar dapat melihat perkembangan tingkatan dan capaiannya, IPM dapat dikategorikan menjadi 4 seperti dibawah ini:

1. Nilai IPM kurang dari 50 ($IPM < 50$), kategori rendah
2. Nilai IPM berada diantara 50 sampai 66 ($50 < IPM < 66$), kategori menengah.
3. Nilai IPM berada antara 66 sampai 80 ($66 < IPM < 80$), kategori menengah atas.
4. Nilai IPM lebih atau sama dengan 80 ($IPM \geq 80$), kategori tinggi.

Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan baik pembangunan secara fisik maupun secara non fisik, pendapatan ini diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dimana terdapat banyak pihak yang terlibat didalamnya dan pendapatan asli daerah tersebut dikelola sendiri oleh pemerintah daerah, sebagaimana dengan kebutuhan dan peraturan yang ditetapkan. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah, merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Mayasari, Sinarwati, Yuniarta, & AK, 2014). Kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan perekonomiannya diukur dari besarnya kontribusi yang dikeluarkan pendapatan asli daerah terhadap APBD. Semakin besar kontribusi

pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen penting pembiayaan daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu bagian dari sumber pendapatan keuangan negara dimana terdapat berbagai penerimaan seperti kredit daerah, cadangan penyesuaian, dan pendapatan asli lainnya serta anggaran sisa dari tahun sebelumnya dapat didistribusikan kembali sebagai sumber subsidi. untuk administrasi di kabupaten-kabupaten. Anggaran pendapatan dan belanja daerah menunjukkan total pendapatan setiap periode. Menurut (Santoso, 1995), rasio PAD terhadap total pendapatan tetap menjadi indikator keuangan pemerintah, meskipun pendapatan asli daerah tidak mampu sepenuhnya mendanai APBD. Meskipun diharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan sumber daya keuangan mereka, peraturan yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan pembiayaan pembangunan juga mengamanatkan bahwa pemerintah daerah meminta bantuan dari berbagai pihak lain dalam upaya mereka untuk meningkatkan mereka.

Pasal 1 UU No. 33 Tahun 2004 mendefinisikan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai pendapatan asli daerah yang dihimpun sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana didefinisikan oleh (Suhanda, 2007) adalah pendapatan yang bersumber dari sumber-sumber yang ada di dalam wilayah daerah sendiri dan dihimpun sesuai dengan peraturan daerah. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mencakup baik belanja daerah maupun pendapatan asli daerah.

Pemda akan mengalokasikan dana pembiayaan tersebut dalam bentuk APBD di suatu daerah yang akan menambah aset tetap daerahnya dengan membangun sarana dan prasarana sebagai pelayanan publik.

Pendapatan daerah dalam realitanya tentu dialokasikan dalam pembangunan berbagai aspek terutama sosial dan kesejahteraan masyarakat, tentu hal itu bukan hal yang baru lagi, dimana kesejahteraan masyarakat sebagai penentu tingkat kemajuan penduduk perlu mendapatkan kontribusi secara langsung dari pemerintah daerah baik secara langsung maupun dengan program yang dibuat oleh setiap pemerintah daerah tersendiri. Dalam membuat anggaran belanja daerah tersebut, pemerintah juga harus memperhitungkan angka tersebut dengan nilai pendapatan asli daerah yang ada, perihal belanja daerah juga penting untuk di analisis penggunaan serta alokasinya karna hal ini terkait dengan fungsi anggaran (Sinambela & Ana, 2016). Hal tersebut dilakukan agar tidak terdapat kekurangan dalam hal keuangan karena realisasi belanja yang lebih besar daripada angka pendapatan di suatu daerah.

Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja pemerintah daerah yang masa manfaatnya melebihi satu anggaran. Terdiri dari penambahan aset tetap sebagai barang milik daerah dan selanjutnya akan menambah pengeluaran rutin pada kelompok pengeluaran Belanja Administrasi Umum berupa biaya pemeliharaan. Kumpulan belanja ini termasuk Jenis Belanja Besar. untuk biaya pelayanan publik dan aparatur daerah (Bastian, 2002).

Belanja Langsung meliputi Belanja Modal, yang digunakan untuk belanja dalam rangka pembelian atau pengadaan barang dan jasa. Belanja Modal juga dapat berupa pembangunan aset tetap berwujud yang digunakan oleh pemerintah, seperti tanah, mesin, gedung, jalan, jaringan irigasi, dan aset tetap lainnya (Pemendagri, 2006).

Menurut (Mardiasmo, 2002), belanja modal dapat membantu mewujudkan karakter daerah yang mandiri dengan mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik. Peningkatan kualitas ekonomi pemerintah daerah melalui penanaman modal (capital expenditure) diharapkan dapat meningkatkan tingkat kontribusi masyarakat terhadap pembangunan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada periode berikutnya dimana investor dan produktivitas meningkat akan dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bermanfaat bagi daerah selama lebih dari satu tahun anggaran, menambah aset daerah, dan mengakibatkan pengeluaran rutin seperti biaya operasi dan biaya pemeliharaan (Ardhini, 2011).

Belanja modal untuk pengadaan pelayanan publik disusun atas dasar kebutuhan masyarakat yang telah disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Belanja modal dalam Pelayanan Publik adalah belanja pemerintah yang manfaatnya membiayai kegiatan investasi terutama penambahan asset sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat sebagai akses publik. Belanja modal jenis ini terdiri atas kepemilikan tanah, pembangunan jalan serta jembatan, bangunan air

(irigasi), belanja modal jaringan, pembelian bangunan gedung untuk publik, belanja modal alat-alat angkutan sarana publik, serta belanja modal dalam bentuk lainya.

Kondisi Geografis Daerah

Menurut (Suharyono & Amin, 1994) geografi didefinisikan sebagai diferensiasi areal fenomena-fenomena yang bertautan di muka bumi dalam arti pentingnya bagi manusia. Menurutnyasasaran utama geografi adalah the *uniquely varying character of the earth surface*. Sedangkan menurut (Bintarto, 1977), Kondisi geografis Indonesia yang dominan maritim terdiri lebih dari 13.000 pulau dengan luas wilayah seperti daratan Amerika Serikat merupakan kendala utama bagi pemerataan tingkat kesejahteraan yang merata baik dalam jumlah maupun mutunya secara nasional.

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 5 pulau besar beserta ribuan pulau kecil lainnya di wilayah Asia Tenggara. Terdapat 17.504 pulau besar dan kecil, dimana sekitar 6.000 diantaranya tidak berpenghuni, tersebar di garis khatulistiwa serta beriklim tropis. Letak Indonesia berada pada koordinat 6° Lintang Utara - 11° Lintang selatan dan 95° bujur timur - 141° bujur timur. Secara geografis, Indonesia diapit oleh dua samudra yaitu samudra Hindia dan Pasifik. Pada saat yang sama, letak geografis Indonesia antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australasia/Oseania. Indonesia memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadinya perdagangan internasional, Tempat ini menempatkan wilayah Indonesia di perbatasan laut dan darat yang berhubungan langsung dengan sepuluh negara tetangga di Asia Tenggara. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia dan Papua Nugini, dan wilayah perairan berbatasan dengan Timor Timur.

Terdapat perbedaan kesejahteraan yang signifikan antara provinsi besar dan daerah kecil. Tingkat kesejahteraan masih sulit diperoleh masyarakat setempat di daerah dengan luas wilayah yang kecil karena tidak mendukung, seperti sarana dan prasarana yang minim, tenaga ahli yang kurang kompeten, kondisi ekonomi masyarakat, dan letak geografis yang sulit untuk diakses. pendidikan. Di sisi lain, tingkat kesejahteraan tersebut didukung oleh berbagai akses publik dan aspek lain yang dapat dengan mudah diterima dan diperoleh dengan baik oleh masyarakat. Tingkat kesejahteraan di provinsi-provinsi besar relatif tinggi, hal ini didukung oleh berbagai aspek yang dapat dengan mudah diterima dan diperoleh dengan baik karena desentralisasi fiskal tidak dapat menghilangkan ketimpangan ekonomi antar provinsi, sebagaimana dikemukakan oleh (Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, 2002). Kurangnya sumber daya pajak dan kurangnya sumber daya yang dieksplorasi oleh pemerintah daerah biasanya menjadi penyebab hal ini. Dilihat dari karakteristik topografis dan demografis masing-masing provinsi di Indonesia, setiap kondisi yang ada dapat dilihat secara utuh.

a. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Indonesia tentu memiliki keanekaragaman yang beragam, meliputi daerah pegunungan/dataran tinggi yang membujur memanjang dengan panjang pulau Sumatra hingga Papua di bagian tengah; dataran rendah yang hampir meliputi sebagian besar di setiap provinsi di Indonesia; dan wilayah periran yang terbagi dalam dua sisi yaitu wilayah perairan bagian selatan samudra Hindia dan bagian utara samudra Pasifik. Ketinggian wilayah lahan di Indonesia pun bervariasi, dimana kondisi topografi wilayah Indonesia yang kompleks dan

bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap ketinggian terhadap parameter temperatur permukaan di wilayah Indonesia (Hutapea, Kurniawan, & Hanggoro, 2015), dan perbedaan ini mempengaruhi pula pola kehidupan ekonomi, sosial serta budaya yang berkembang dimasyarakat setiap wilayahnya. Ketinggian wilayah dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan serta corak kehidupan sosial ekonomi yang ada. Topografi wilayah Indonesia terdiri dari wilayah daratan sebagai berikut:

- Ketinggian antara 0-200m wilayah dataran rendah terutama bagian pesisir pulau-pulau kecil dan besar di Indonesia.
- Ketinggian antara 300-600m dataran tinggi mendominasi setiap wilayah pulau pulau besar di Indonesia, terutama pulau Sumatra, Jawa, dan Kalimantan.
- Ketinggian lebih dari 700m wilayah pegunungan, pada Gunung-gunung aktif yang memanjang sepanjang pulau Sumatra hingga Papua.

b. Kondisi Demografi

Penduduk adalah mereka yang memiliki tempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara (Sudarsono, 2016), dimana Jumlah penduduk adalah suatu indikator penting dalam suatu negara (Asmuruf, 2015), Menurut Badan Pusat Statistik Nasional jumlah penduduk Indonesia 276,4juta jiwa pada tahun 2021 berdasarkan proyeksi Sensus Penduduk (SP), persebaran penduduk tersebar keseluruh wilayah kepulauan di Indonesia, sebesar 56,01% atau sekitar 154juta jiwa penduduk terkonsentrasi pada pulau Jawa, sebagian besar lainnya tersebar pula

secara merata ke pulau pulau besar seperti Sumatra Kalimantan serta Papua. Jumlah penduduk keseluruhan terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 138.3juta jiwa (50,5%) dan perempuan sebanyak 135,57juta jiwa (49,5%). Dilihat dari distribusi penduduk per Provinsi, dapat dilihat bahwa provinsi dengan penduduk paling banyak yaitu provinsi Jawa Barat sejumlah 147,586,943 jiwa, dan wilayah dengan penduduk paling sedikit adalah provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah penduduk sebesar 698,003 jiwa. Persebaran penduduk pada pulau-pulau besar tentu dipengaruhi oleh banyak aspek yang melatar belakanginya, tidak dapat dipungkiri pula kondisi demografi atau kepadatan jumlah penduduk pada setiap wilayah provinsi tentu membawa pengaruh akan aspek baik sosial, dan ekonomi yang berkembang didalam pemerintahan provinsi tersebut.

Penelitian Terdahulu

Penelitian (Hairiyah, Malisan, & Fakhroni, 2018) tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah ada atau tidak pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap Belanja Modal. Penelitian ini menggunakan teknik Uji Asumsi Klasik dengan Software SPSS 21 yang digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh dalam variable independen terhadap variable dependen menggunakan data dari Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kalimantan Timur tahun 2010-2015. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa yang pertama PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Yang kedua yaitu DAK mempunyai

pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Yang ketiga yaitu DAU mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian (Pamungkas, 2019) tentang Kebahagiaan Penduduk di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kebahagiaan di provinsi Jawa Barat dengan menggunakan beberapa Indikator dimana salah satunya adalah jenis kelamin penduduk (Demografi) serta wilayah yang terbagi dalam perkotaan serta pedesaan (Topologi) di Jawa Barat. Survei ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif serta menggunakan data dari Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2017 yang diterbitkan oleh BPS RI dalam Buku Indeks Kebahagiaan 2017. Survei dilakukan di rumah tangga dari tanggal 5 hingga 30 April. Penelitian tersebut memberikan simpulan bahwa kesejahteraan penduduk Jawa Barat tahun 2017 didasarkan pada karakteristik sosiodemografi. Artinya, penduduk perkotaan lebih bahagia daripada penduduk pedesaan, penduduk laki-laki lebih bahagia daripada penduduk perempuan, dan semakin berpendidikan suatu penduduk, maka semakin akan merasa lebih bahagia.

Penelitian (Afifanda, 2017) mahasiswa UII angkatan 12 membawa tema kauntansi sektor publik tentang pengaruh Dana Lokasi Umum, Jumlah Penduduk, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di DIY dan Jawa Tengah, penelitian terkait mmeberi simpulan bahwa Dana Alokasi Umum dan Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja modal, variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian tersebut didapatkan dari Web Dspace UII data penelitian alumni setiap tahunnya.

2.2 Hipotesis Penelitian

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pemabangunan Manusia.

Pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi dan stabil merupakan impian bagi setiap daerah karena pendapatan asli daerah yang tinggi dapat menandakan bahwa pemerintah daerah berhasil melaksanakan otonomi daerah dengan baik, serta pendapatan asli daerah yang tinggi menandakan pula bahwa setiap daerah dapat mengalokasikan dana dengan baik dan optimal. Pergerakan aktivitas ekonomi dengan memberikan penghasilan tambahan kepada masyarakat selama kurun waktu tertentu tentu dapat dilihat pada tingkat pertumbuhan ekonomi serta tingkat kesejahteraan yang ada. (Wijayanti & Darsana, 2015) menyebutkan pada penelitiannya bahwa PAD dan DAU (Dana Alokasi Khusus) berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini menandakan bahwa semakin meningkatnya penerimaan PAD dan DAU, maka meningkat pula penerimaan PDRBnya. Selain daerah tersebut mampu memperoleh pendapatan asli daerah yang tinggi, pembangunan daerah tersebut belum dapat dikatakan berhasil jika pertumbuhan ekonominya stagnan atau menurun. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adriansyah (2014) dan Kuspriyanto (2016). Penelitian tersebut menunjukkan semakin meningkatnya nilai kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah, maka semakin meningkat pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mampu menggali dan memaksimalkan potensi sumber-sumber pendapatan di daerah tersebut. Hal ini akan berpengaruh pada tingkat kebahagiaan

yang dialami masyarakat, yang akan mengalami penurunan. Menurut (Sidik, 2002) sejauh mana PAD meningkatkan upaya pembangunan manusia untuk semua kegiatan di daerah, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan memfasilitasi infrastruktur yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat di provinsi tersebut, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan indeks pembangunan manusia di masa mendatang, sebaiknya dijadikan tolok ukur bukan besaran PAD yang diterima oleh suatu daerah.

Hal ini menandakan bahwa apabila PAD mengalami peningkatan, maka dana yang dimiliki daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki akan meningkat pula, sehingga dapat mempengaruhi peningkatan indeks pembangunan manusia.

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut (Subandi, 2008) pembangunan daerah merupakan hubungan tersistem yang berjalan antara pemerintah daerah dengan masyarakat umum melalui pengelolaan potensi serta sumber daya yang ada, dan membangun kerjasama dengan sektor swasta sehingga mampu menstimulus perkembangan dari segi aktifitas kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah.

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur arus perekonomian dengan menetapkan tingkat penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahun, serta anggaran pemerintah pusat dan daerah (APBN,

APBD). Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah dipengaruhi oleh kebijakan alokasi belanja modal melalui anggaran dana alokasi umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Alexiou, 2009). Anggaran Pendapatan Belanja Nasional dan Belanja Daerah (APBN, APBD) diadakan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga, tingkat produksi, kesempatan kerja, serta untuk merangsang peningkatan kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan aset serta program pemerintah yang ada.

Dari belanja modal yang direalisasikan oleh pemerintah akan mendapatkan Aset berwujud yang dihasilkan dan menjadi persyaratan utama bagi kota untuk menyediakan layanan publik, tentu pengalokasian anggaran belanja modal tersebut berbeda dengan pengalokasian terhadap pemeliharaan aset yang dihasilkan dari belanja tersebut (Halim & Abdullah, 2006) Untuk meningkatkan aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan pendanaan anggaran belanja modal dalam APBD. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Adi dan Christy (2009), Hendarmin (2012), dan Supadmi (2016), membuktikan bahwa dengan mengalokasikan lebih banyak anggaran belanja ke Belanja Modal sesuai dengan dimensi IPM, maka tingkat Kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Dimana belanja modal merupakan salah satu perangkat pemerintah yang digunakan sebagai pemacu pembangunan daerah, dan alokasi belanja modal tersebut difaktori oleh kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi misi pemerintah dan merencanakan program pemerintah untuk mengembangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Jika suatu daerah dapat terus-menerus meningkatkan

infrastruktur yang ada, ia dapat mencapai konteks pembangunan manusia yang terus meningkat dari daerah itu.

H₂: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pengaruh Kondisi Geografis Wilayah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

A. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Kemampuan daerah dalam penyediaan dana dari daerah itu sendiri sangat bergantung pada potensi ekonomi yang diolah kedalam bentuk kegiatan ekonomi yang tentu diharapkan mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Nugraheni, 2020). Salah satu potensi ekonomi adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk bagi pemerintah daerah dipandang sebagai aset modal yang berpengaruh menjadi dasar pembangunan baik secara fisik maupun nonfisik, sekaligus juga dapat menjadi beban pembangunan upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan penduduk itu sendiri. Sebagai aset yang berpengaruh apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keterampilan maka dapat meningkatkan produksi nasional serta indeks pembangunan manusia yang ada. Jika distribusi dan kualitas penduduk yang besar tidak ditingkatkan sedemikian rupa sehingga hanya membutuhkan pelayanan sosial dan tingkat produksi yang rendah sehingga menjadi tanggung jawab mereka yang bekerja secara efektif, maka penduduk akan menjadi beban (Devita, Andri, Delis, & Junaidi, 2015).

H_{3A}: Kondisi Demografi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

B. Pengaruh Topologi Wilayah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Letak wilayah Indonesia memiliki kondisi geografis yang berbeda pada setiap wilayahnya. Kondisi geografis dapat dilihat dari segala sisi aspek seperti ketinggian wilayah serta topologi wilayah yang ada. Di setiap provinsi tentu memiliki terdapat daerah pegunungan/dataran tinggi yang membujur memanjang di bagian sepanjang pulau Sumatra hingga Papua; dataran rendah yang hampir meliputi sebagian besar setiap wilayah pulau di Indonesia namun wilayah dengan dataran rendah yang mendominasi di pulau Jawa, Kalimantan serta Sulawesi; dan wilayah perairan yang terbagi dalam dua sisi yaitu samudra Hindia serta samudra Pasifik, Kondisi tersebut menimbulkan banyak perbedaan antar wilayah dengan topologi yang berbeda, kondisi ekonomi serta sosial budaya yang tumbuh akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia masyarakatnya tergantung bagaimana kondisi tersebut dapat diatasi dengan optimal atau bahkan sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh (Farida, 2013) dengan bahwa secara umum aspek aksesibilitas cenderung mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berkembang. Hal ini mempengaruhi dimensi indeks pembangunan manusia masyarakatnya secara langsung sehingga tidak dapat dipungkiri kondisi geografis ini menjadi salah satu penunjang utama dalam upaya guna peningkatan indeks pembangunan manusia melalui setiap aspek yang tumbuh dalam masyarakat.

H_{3B}: Kondisi Topografi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan populasi 34 pemerintahan provinsi di Indonesia. Sampel ini diambil dengan menggunakan cara purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penelitian pada tahap pengambilan sampel dimana mempertimbangkan aspek tertentu yang umumnya disesuaikan dengan tujuan dan masalah penelitian yang ada (Sugiyono, 2010). Menurut Sugiyono (2010) Sampel adalah bagian dalam penelitian dengan mengambil populasi yang karakteristiknya hendak diteliti dan dianggap bisa mewakili seluruh populasi yang ada.

Dengan kriteria penentuan sampel yang sudah ditetapkan, maka sampel yang digunakan dalam penelitian adalah Data Kependudukan tahun 2019-2021, Data Realisasi Belanja Modal tahun 2019-2021, Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2019-2021, Serta Data Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019-2021

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan Realisasi Belanja Modal, laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, serta data perhitungan Indeks Pembangunan Manusia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nasional Indonesia Departemen Keuangan dan Kependudukan yang telah di Unggah dalam Situs Web BPS. Menggunakan data time series berupa

Laporan Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah pada data Realisasi Anggaran. Data dan jumlah penduduk bersumber dari Badan Pusat Statistik Terkait.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia, variabel ini menggambarkan pengaruh langsung dari Indeks kebahagiaan yang dimana terdapat tiga indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan untuk mengukur kinerja rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia yang apabila dilihat dari ketiga dimensi tersebut, ketiga dimensi tersebut sebenarnya termasuk dalam dimensi yang mengukur Happiness Index, yang seperti dijelaskan oleh UNDP, Oleh karena itu, peningkatan nilai IPM suatu negara akan mempengaruhi tingkat Happiness Index negara tersebut. Selain itu, jika suatu negara ingin menaikkan skor HDI-nya, beberapa pendekatan yang menggunakan dimensi Indeks Kebahagiaan sebagai dasar mempercepat peluang peningkatan skor HDI negara tersebut. Semua dimensi ini termasuk dalam dimensi Indeks Kebahagiaan. Indeks Pembangunan Manusia = $\ln (IPM)$

2. Variabel Independen

a. Pendapatan Asli Daerah

Selama tahun anggaran yang bersangkutan, seluruh pendapatan daerah terdiri dari penambahan aset atau pengurangan utang dari berbagai sumber. Salah satu bentuk pendapatan daerah yang sangat berperan dalam pembangunan baik fisik maupun non fisik adalah pendapatan asli daerah. Dalam pembahasan ini data

menggunakan log normal (Ln). Tujuan penggunaan log natural (Ln) adalah untuk mengurangi fluktuasi data yang kontradiktif. Nilai variabelnya akan sangat besar, bisa miliaran bahkan triliunan rupiah, jika nilai PAD langsung diolah. Data yang ada dapat disederhanakan dengan menggunakan Ln natural tanpa mengubah proporsi nilai aslinya yang sebenarnya. $\text{Ln (PAD) = Pendapatan Asli Daerah}$

b. Belanja Modal

Pada kelompok belanja Administrasi Umum, belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Ini menambah aset tetap atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah pengeluaran rutin seperti biaya pemeliharaan. Jenis Belanja yang Baik termasuk dalam kategori belanja ini. untuk biaya pelayanan publik dan aparatur daerah (Bastian, 2002). Dalam Laporan Realisasi Belanja Modal (APBD), variabel ini diukur dalam skala Belanja Modal setiap Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah. Log Alam (Ln) dari Belanja Modal digunakan untuk mengukur belanja modal dalam penelitian ini. Tujuan penggunaan natural natural log (Ln) adalah untuk mengurangi fluktuasi jumlah data yang bertentangan. Nilai variabelnya yang bisa miliaran bahkan triliunan rupiah akan sangat tinggi jika nilai belanja modal yang diperoleh langsung diolah. Data yang ada dapat disederhanakan dengan menggunakan Ln natural tanpa mengubah proporsi nilai aslinya yang sebenarnya. Ln (BM) dikurangi belanja modal

c. Jumlah Penduduk (Demografi)

Pada penelitian ini, jumlah penduduk diukur dalam pendekatan Densitas dengan data yang telah diambil dalam standar ribuan hingga jutaan pada setiap provinsinya dalam kurun waktu 2019 hingga 2021.

d. Ketinggian Wilayah (Topologi)

Pada penelitian ini, kondisi topologi wilayah dibagi dalam 3 kondisi, wilayah Dataran Rendah, Dataran Tinggi, serta wilayah Gunung/Pegunungan.

3.4 Analisis Data

Bentuk penelitian ini merupakan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu untuk menganalisis dan mengetahui tingkat pembangunan manusia secara subjektif atau dengan kata lain indeks pembangunan manusia setiap Provinsi di Indonesia berdasarkan faktor ekonomi dan non ekonomi. Menurut jenisnya, penelitian ini menggunakan data data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan berdasarkan sumbernya menggunakan data sekunder.

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif sebagai deskripsi awal variabel utama pada bidang keuangan yang diungkapkan pemerintah dalam laporan keuangan untuk kurun tahun tertentu. Pada bagian ini analisis yang digunakan adalah analisis nilai tengah, maksimal, minimal, serta standar deviasi dalam mendeskripsikan variabel penelitian tersebut.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah persamaan regresi dapat digunakan sebagai dasar hipotesis yang tidak bias atau jelas. Untuk lebih memastikan bahwa model persamaan regresi kompatibel, uji asumsi coba-dan-benar ini harus digunakan, terutama ketika berhadapan dengan sejumlah besar data. (Ghozali, 2011) mengidentifikasi empat tahapan untuk menguji asumsi klasik: uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji normalitas

Dalam pemodelan regresi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen menunjukkan distribusi data yang normal atau tidak. Uji statistik Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S) digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan normalitas data.

2. Uji multikolinearitas

Terjadi ketika satu variabel independen berkorelasi dengan variabel independen lainnya. Jika terdapat hubungan linier antara variabel independen dalam pemodelan regresi, maka multikolinearitas dapat ditunjukkan pada bagian ini. Bagian nilai toleransi dan lawannya, Variance Inflation Factor (VIF), dapat dilihat untuk menentukan apakah ada multikolinearitas dalam pemodelan regresi. Nilai akhir yang umumnya digunakan sebagai indikasi multikolinearitas adalah nilai resiliensi $< 0,10$ atau nilai VIF > 10 .

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah varians residual satu kasus pengamatan berbeda dengan kasus lain dalam model regresi. Homoskedastisitas dan heteroskedastisitas masing-masing mengacu pada nilai tetap dan perbedaan varian residual. Grafik antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan residunya (SRESID) dapat digunakan untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas. Gambaran:

- a. Heteroskedastisitas telah teridentifikasi jika pola tertentu membentuk pola yang teratur.
- b. Tidak ada heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang terlihat, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka pada sumbu Y.

4. Autokorelasi

Autokorelasi dapat diartikan sebagai kesalahan pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Penyimpangan dugaan ini biasanya akan muncul pada tahap observasi dimana penggunaan data *time series*. Untuk mendiagnosis uji ini dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin Watson*.

3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, dikarenakan dalam penelitian ini melibatkan beberapa variabel bebas (independen) serta satu variabel terikat (dependen). Model regresi linier berganda yang akan digunakan sebagai berikut :

$$LNIPM = \alpha + \beta_1 LNPAD + \beta_2 LNBM + \beta_3 JP + \beta_4 KW + e$$

Dimana :

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

PAD : Pendapatan Asli Daerah

BM : Belanja Modal

JP : Jumlah Penduduk

KW : Ketinggian Wilayah

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

e : Error

3.4.4 Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen dapat menjelaskan persentase variasi variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2011). Nilai mendekati 1 (satu) berarti bahwa faktor-faktor bebas memberikan hampir semua data yang diharapkan untuk memprediksi variabel dependen yang digunakan.

3.4.5 Uji Hipotesis

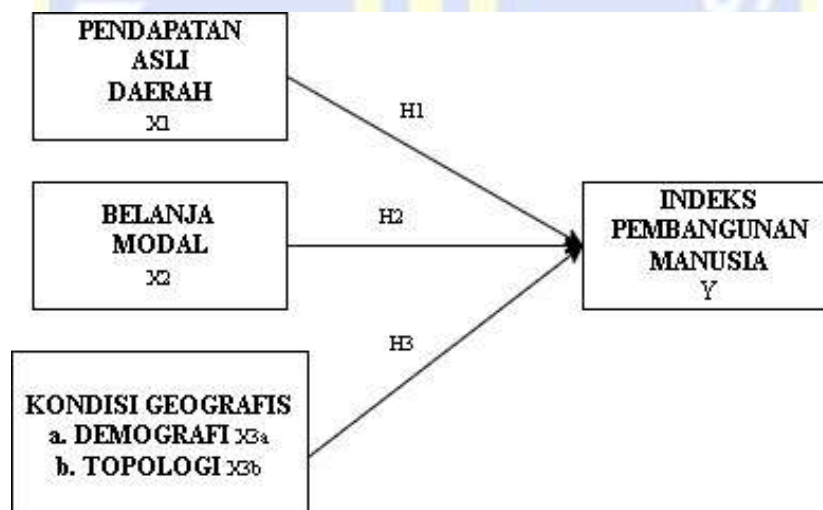
Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji Parsial (Uji t). Uji Parsial (Uji t) sebagai pengujian guna mengetahui kemampuan setiap variabel independen yang ada dalam menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan hipotesisnya adalah jika nilai signifikansi $< 0,05$ menandakan bahwa variabel independen (PAD, Belanja Modal, Jumlah Penduduk dan Ketinggian Wilayah) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Indeks Pembangunan Manusia) sedangkan apabila nilai signifikansi $> 0,05$ berarti variabel

independen (PAD, Belanja Modal, Jumlah Penduduk dan Ketinggian Wilayah) tidak berpengaruh signifikan terhadap variable dependen (Indeks Pembangunan Manusia).

3.4.6 Teknik analisis jalur (path analysis)

Ini adalah metode analisis data yang akan digunakan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung dari setiap variabel dalam penelitian ini. Penggunaan tanda panah (model analisis jalur) untuk menggambarkan hubungan antar variabel dalam analisis jalur merupakan pengembangan dari analisis regresi linier berganda. Sebuah teori yang menegaskan hubungan sebab akibat mendasari pengujian hubungan variabel.

Gambar 1
MODE ANALISIS JALUR



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Nilai standar deviasi, maksimum, dan minimum digunakan dalam statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum atau penjelasan tentang suatu kumpulan data. Untuk memberikan gambaran tentang data variabel penelitian digunakan statistik deskriptif yang telah terlebih dahulu lulus uji untuk menyajikan data. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Statistika Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD (x ₁)	102	6,32	10,73	8,3835	1,09644
BM (x ₂)	102	6,50	9,96	8,3463	,69833
Demograf (x _{3A})	102	702000,00	49317000,00	8189078,4314	11323705,62943
Topologi (x _{3B})	102	1,00	3,00	1,5000	,60933
IPM (y)	102	60,44	81,11	71,1252	3,87704
Valid N (listwise)	102				

Sumber : SPSS diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.1. dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

1. Nilai minimum dan maksimum Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada provinsi di Indonesia adalah 6,32 dan 10,73, nilai PAD terendah menduduki provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 dengan pendapatan Rp.557.650.000.000, dan nilai PAD tertinggi pada provinsi DKI Jakarta dengan nilai pendapatan bekisar pada angka Rp.45.707.400.000.000,-. Nilai mean dari variabel PAD

adalah sebesar 8407,8849 dengan nilai standar deviasi dari variabel PAD adalah sebesar 1,096

2. Nilai minimum dan maksimum Belanja Modal pada provinsi di Indonesia adalah sebesar 6,50 dan 9,96. Nilai Belanja Modal terendah pada provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 sebesar 665,17M, sedangkan nilai tertinggi sebesar 21119,90M terjadi pada Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019. Nilai mean Belanja Modal pada provinsi di Indonesia adalah sebesar 5344,9771 dengan nilai standar deviasi dari variabel Belanja Modal adalah sebesar 0,69833.
3. Nilai minimum dan maksimum kondisi Demografi pada provinsi di Indonesia adalah 702.000jiwa dan 49.317.000jiwa. Nilai minimum terjadi pada provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah penduduk 702.000 jiwa, sedangkan jumlah penduduk tertinggi sebanyak 49.317.000 jiwa menduduki wilayah Jawa Barat Dengan nilai standar deviasi dari variabel belanja tersebut adalah sebesar 11323705,62
4. Pada kondisi Topologi wilayah Nilai minimum menduduki angka 0,00 menandakan wilayah 1,00 yaitu dataran rendah dengan ketinggian wilayah bekisar antara 0-200m, nilai maksimum 1,10 pada wilayah 3,00 menduduki kisaran tinggi wilayah >700m yaitu pegunungan/gunung.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Pemenuhan asumsi klasik regresi tersebut digunakan untuk mengetahui apakah pemodelan tersebut benar-benar menunjukkan hubungan antar variabel yang signifikan dan representative atau tidak. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan uji autokorelasi.

5. Uji Normalitas

Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan apakah variabel terikat dan variabel bebas, atau keduanya, memiliki distribusi data normal dalam suatu regresi. Dengan membandingkan probabilitas berdasarkan nilai signifikan = 0,05 maka dilakukan pengujian ini. Data berdistribusi normal jika tanda hitungnya lebih besar dari Sementara itu, data tidak mengikuti distribusi normal jika tanda hitungnya positif. Hasil uji normalitas dapat ditunjukkan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Output Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std.	
	Deviation	2,57026847
Most Extreme Differences	Absolute	,083
	Positive	,055
	Negative	-,083
Test Statistic		,083
Asymp. Sig. (2-tailed)		,081 ^c

Sumber : SPSS diolah, 2022

berdasarkan tabel 4.2 hasil uji Kolmogorov-Smirnov. Nilai probabilitas yang muncul adalah 0,081c, yang lebih besar dari = 5%, seperti yang terlihat. Hasilnya, data penelitian model penelitian ini dapat dikatakan normal.

6. Uji Multikolinieritas

Hubungan antara variabel prediktor atau independen dengan variabel prediktor lainnya disebut multikolinearitas. Seharusnya tidak ada korelasi antara variabel independen dalam contoh regresi yang baik. Variabel-variabel ini tidak ortogonal jika variabel independen berkorelasi. Menurut (Ghozali, 2011) variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antara keduanya sama dengan nol. Nilai variance inflation factor (VIF) sistem diamati selama uji multikolinearitas. Multikolinieritas tidak terdapat dalam model regresi berganda jika nilai VIF kurang dari 10 atau toleransi lebih besar dari 0,10 (Ghozali, 2011).

Tabel 4.3
Output Uji Multikolinieritas

Variabel Independent	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
LN PAD	,222	4,501	Tidak ada Multikolinieritas
LN BM	,306	3,267	Tidak ada Multikolinieritas
Demografi	,408	2,454	Tidak ada Multikolinieritas
Topologi	,621	1,609	Tidak ada Multikolinieritas

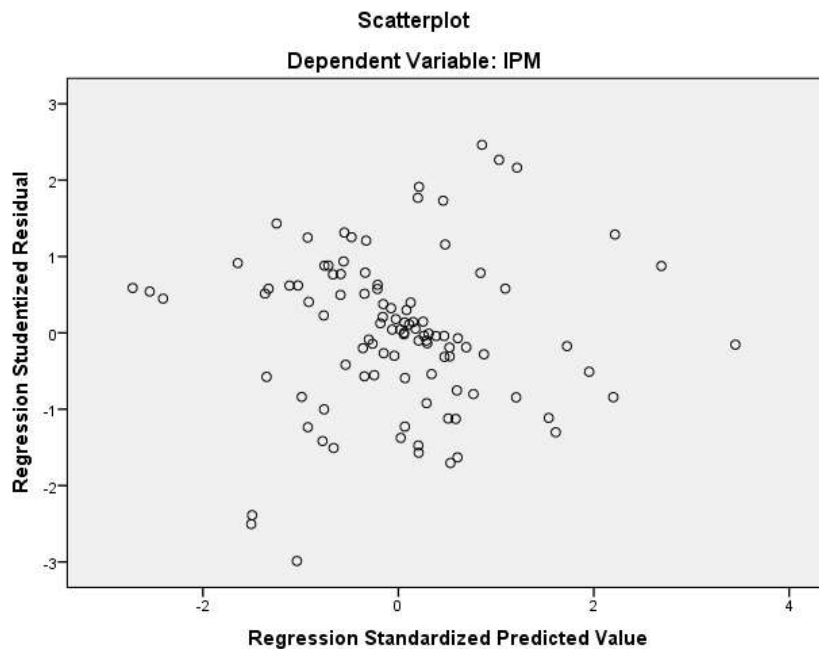
Sumber : SPSS diolah, 2022

Dari hasil tabel 4.3., dapat diketahui bahwa keseluruhan variabel bebas mempunyai nilai VIF kurang dari 10, dan nilai tolerance lebih dari 0,100 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam pemodelan penelitian ini.

7. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan pengujian heteroskedastisitas adalah untuk menentukan apakah hasil model regresi menunjukkan heteroskedastisitas atau homoskedastisitas—ketidaksamaan varians variabel antarpengamatan. Ketika term gangguan untuk setiap observasi tidak lagi konstan tetapi bervariasi, maka gejala heteroskedastisitas dapat muncul. Banyak model memungkinkan perhitungan heteroskedastisitas, salah satunya adalah metode Graph Plot, yang membandingkan nilai prediksi variabel dependen, ZPRED, dengan SRESID residual. Dengan mencari pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED, dapat ditentukan apakah ada heteroskedastisitas atau tidak. Gambar berikut menggambarkan temuan Uji Heteroskedastisitas:

Gambar 2
Output Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Output SPSS diolah, 2022

Berdasarkan gambar 4.4. diatasnya dapat dilihat dengan baik bahwa penyebaran informasi sisa yang menyebar sembarangan tidak berkumpul membentuk contoh diatas dan dibawah hub 0 Y, cenderung dapat dikatakan bahwa model relaps tidak menunjukkan efek samping dari heteroskedastisitas.

8. Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali, 2011), uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah model regresi linier ini memiliki hubungan antara pelanggaran pada periode $t-1$ sebelumnya dengan kesalahan pada periode t . Diketahui bahwa masalah autokorelasi berulang seperti ini dapat “mengganggu” hubungan antar data, oleh

karena itu pengujian ini dilakukan pada data deret waktu yang digunakan dalam penelitian ini (Ghozali, 2011). Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Output Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,749 ^a	,561	,542	2,62273	2,126

Sumber : SPSS diolah, 2022

Nilai Durbin-Watson adalah 2,322, seperti terlihat dari hasil pada tabel 4.5 di atas. Pada taraf signifikansi 5%, dengan n sama dengan 102 dan k = 4, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai dL dan dU. Nilai dL adalah 1,5969, dan nilai dU adalah 1,7569, menurut standar tersebut. Nilai Durbin-Watson sebesar 2,126 lebih menonjol daripada harga dU, sehingga tidak ada autokorelasi yang pasti dalam model kekambuhan ulasan ini.

4.3 Hasil Analisis Regresi Berganda

Analisis ini Memprediksi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen, baik seluruhnya maupun sebagian, dapat dilakukan melalui analisis regresi berganda. Konsekuensi dari berbagai tes relaps langsung dapat ditampilkan pada tabel terlampir:

Tabel 4.5
Output Regresi Berganda

Variabel Independent	Koefisien regresi	T Hitung	Signifikansi	Kesimpulan
Konstanta	67,524	16,332	,000	
LNPAD	4,129	8,177**	,000	H1 didukung
LNBM	-3,410	-5,048	,000	H2 tidak didukung
Demograf	-1,315	-3,643	,000	H3a didukung
Topologi	-,988	-1,818*	,072	H3b didukung

Variabel Dependen LNIPM

Keterangan * : Signifikan < 10%

** : Signifikan < 5%

Sumber : Output SPSS diolah, 2022

Keterangan

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

PAD : Pendapatan Asli Daerah

BM : Belanja Modal

Demo : Kondisi Demografi (Jumlah Penduduk)

Topo : Kondisi Topografi (Ketinggian Wilayah)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dapat diperoleh model persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$\text{LNIPM} = 67,524 + 4,129\text{LNPAD} + -3,410\text{LNBM} + -1,315\text{JP} + -0,988\text{KW} + e$$

Dari hasil model persamaan regresi di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Nilai Intercept konstanta sebesar 67,524. Hasil tersebut dapat diartikan, apabila besarnya nilai seluruh variabel independen sama dengan nol, maka besarnya indeks pembangunan manusia adalah 67,524

2. Koefisien LNPPAD sebesar 4,129. Dimana hasil tersebut diartikan apabila pendapatan asli daerah mengalami peningkatan 1 persen, maka besarnya indeks pembangunan manusia meningkat sebesar 4,12% dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
3. Nilai koefisien regresi LNBM= -3,410 yang artinya peningkatan belanja modal sebesar 1% maka akan menyebabkan penurunan indeks pembangunan manusia sebesar 3,4%.
4. Nilai koefisien regresi LNJP sebesar -1,315 mengartikan bahwa apabila terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 1% akan menyebabkan penurunan pada indeks pembangunan manusia sebesar -1,3%.
5. Nilai koefisien regresi LNKW=-0,988 yang artinya ketinggian wilayah setiap provinsi mengalami peningkatan 1% akan menyebabkan penurunan indeks pembangunan manusia sebesar -0,988%

4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel bebas diukur dengan nilai R². Koefisien determinasi memiliki nilai dalam kisaran nol hingga satu. Fakta bahwa nilai R² mendekati satu menunjukkan bahwa variabel bebas mengandung hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variabel bebas diukur dengan nilai R². Namun, karena R² memiliki kelemahan mendasar yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang masuk ke dalam model, maka penelitian ini menggunakan nilai adjusted R² antara 0 dan 1. Kemampuan model

untuk menjelaskan variabel dependen meningkat semakin mendekati nilai adjusted R² adalah dengan 1 . Tabel 4.5 menampilkan hasil analisis koefisien determinasi.

Hasil analisis koefisien determinasi, dihasilkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,542. Dimana hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya variasi variabel *independent* dalam mempengaruhi model persamaan regresi adalah sebesar 54,2% dan sisanya sebesar 45,8% dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model regresi.

4.3.2 Uji Hipotesis

Tabel 4.6
Hasil Regresi Berganda

Variabel Independent	Koefisien regresi	T Hitung	Signifikansi	Kesimpulan
Konstanta	67,524	16,332	,000	
LNPAD	4,129	8,177**	,000	H1 didukung
LNBM	-3,410	-5,048	,000	H2 tidak didukung
Demograf	-1,315	-3,643	,000	H3a didukung
Topologi	-,988	-1,818*	,072	H3b didukung

Sumber : Output SPSS diolah, 2022

Dengan menggunakan uji t, penelitian ini menguji hipotesis. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen terhadap penjelasan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05 atau kurang dari 5%.

1. Uji Hipotesis pertama

Pengujian spekulasi primer harus terlihat dari tabel 4.6. Signifikansi koefisien regresi variabel PAD diperiksa untuk menguji hipotesis ini. Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia

ditingkatkan oleh Pendapatan Asli Daerah. Luasnya koefisien kekambuhan bantal adalah 4,12 dan nilai kepentingan $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu H1 penelitian ini diterima karena dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2. Uji Hipotesis Kedua

Pengujian spekulasi berikutnya harus terlihat dari tabel 4.6. Signifikansi koefisien regresi variabel Belanja Modal diperiksa untuk menguji hipotesis ini. Indeks pembangunan manusia dipengaruhi oleh belanja modal, menurut hipotesis penelitian ini H2. Koefisien regresi belanja modal memiliki tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ dan besarnya -3,41. Hal ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan dipengaruhi secara signifikan oleh variabel belanja modal kurang dari 10%.

3. Uji Hipotesis Ketiga

Tabel 4.6 menunjukkan pengujian hipotesis kedua. Pengujian spekulasi ini dilakukan dengan menguji makna koefisien regresi dari variabel populasi. Menurut hipotesis H_{3A} penelitian ini, indeks pembangunan manusia tidak dipengaruhi secara positif oleh jumlah penduduk. Koefisien regresi populasi memiliki tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ dan besarnya -1,31. Oleh karena itu, H_{3A} diterima karena variabel kependudukan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

4. Pengujian Hipotesis Keempat

Tabel 4.6 menunjukkan pengujian hipotesis keempat. Signifikansi koefisien regresi area ketinggian variabel diperiksa untuk menguji hipotesis ini. Menurut

hipotesis H_{3B} dari penelitian ini, indeks pembangunan manusia tidak dipengaruhi secara positif oleh ketinggian. Koefisien regresi populasi memiliki tingkat signifikansi $0,072 < 0,05$ dan besarnya $-0,0988$. Hal ini menunjukkan bahwa ketinggian wilayah tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia $< 5\%$.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi PAD yang didapatkan oleh pemerintahan provinsi akan meningkatkan indeks pembangunan manusia provinsi tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya, pemerintah bebas menggunakan PAD dalam rangkapembangunan serta pemberdayaan program pemerintah terhadap masyarakat (Wijaya, 2007) ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak PAD yang diterima maka berarti semakin besar potensi pemerintahan provinsi untuk melakukan upaya peningkatan indeks pemabangunan manusia nya melalui berbagai aspek sosial, baik seperti meningkatkan sarana kesehatan dan yang paling utama dari segi pendidikan. Pengalokasian dana Pendapatan Asli Daerah dapat disalurkan dalam berbagai aspek seperti alokasi Belanja Modal, Tunjangan Program Pemerintah, dan lainnya.

Alokasi yang tepat oleh pemerintahan provinsi terhadap penggunaan dana PAD tentu akan memberikan dampak positif bagi perkembangan kualitas penduduknya, pengalokasian terhadap sistem serta sarana Pendidikan, dan Kesehatan yang ada akan menunjang kehidupan serta kebutuhan pokok masyarakat, pendanaan dalam pengembangan aspek-aspek tersebut akan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi serta tingkat kesejahteraan yang ada. Dengan begitu PAD tersebut tepat dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia terhadap segala aktifitas aspek-aspek sosial yang tengah dijalani oleh masyarakat di provinsi tersebut, sehingga selanjutnya dapat berdampak positif bagi peningkatan indeks pembangunan manusianya.

Indeks Pembangunan Manusia, atau HDI, dipengaruhi oleh PAD, yang memainkan peran penting dalam kenaikannya. Fakta bahwa pemerintah yang lebih rendah mendapatkan lebih banyak PAD menunjukkan bahwa daerah memiliki cukup uang untuk dibelanjakan pada sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang mendukung HDI. Menurut (Setyowati & Suparwati, 2012), dan (Lugastoro, 2013) PAD berdampak positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Temuan ini memberikan kepercayaan pada pernyataan ini.

Hal ini menandakan bahwa apabila PAD pada tahun-tahun ini mengalami peningkatan, maka dana yang dimiliki daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki daerah provinsi terus meningkat pula, sehingga dapat mempengaruhi peningkatan indeks pembangunan manusia semakin tinggi.

4.4.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia itu sendiri. Pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran akan meningkatkan pengeluaran rutin kelompok seperti biaya pemeliharaan dan aset tetap atau kekayaan daerah. Biaya administrasi umum. Baik belanja untuk pengembangan pelayanan publik maupun untuk aparatur daerah termasuk dalam kategori belanja ini. penelitian ini dengan menggunakan data pada tahun 2019 hingga 2021 menunjukan bahwa pengaruh Belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia negatif signifikan, dimana apabila terjadi peningkatan pada nilai Belanja Modal maka akan terjadi penurunan pada Indeks Pembangunan Manusia.

Alokasi dana Belanja Modal pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan pesat pada aspek pengadaan barang serta sarana publik, fokus utama pada sarana kesehatan. Dimulai pada tahun 2019 wilayah Indonesia bahkan seluruh dunia sedang dilanda wabah penyakit virus COVID-19, dimana wabah ini membawa dampak buruk bagi setiap aspek kehidupan yang berjalan didalam masyarakatnya. Terutama pada aspek Kesehatan, Ekonomi, serta Pendidikan dimana ketiga aspek ini adalah faktor didalam dimensi Indeks Pembangunan Manusia, tentu apabila salah satu faktor mengalami penurunan kualitas akan mempengaruhi aspek-aspek lainnya. Alokasi dana belanja modal yang dilakukan pemerintah provinsi lebih menitik beratkan pada pengadaan barang kesehatan serta sarana dan prasaranan kesehatan guna menunjang kebutuhan masyarakat dimasa

wabah pandemi covid-19 tersebut. Peningkatan salah satu aspek ini secara tidak langsung akan terjadi kesenjangan terhadap aspek lainnya, aspek pendidikan menjadi terganggu dimana siswa tidak dapat bersekolah pada masa pandemi tersebut, terhambatnya sistem perekonomian baik kegiatan ekonomi sederhana maupun didalam pemerintahan.

Alokasi pemerintah dalam pengadaan aset serta alokasi dalam belanja terkait, berpotensi besar menekan biaya lain seperti hal nya dengan biaya pembangunan masyarakat, alokasi biaya pada bidang tersebut akan mengalami penurunan dimana seharusnya upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas penduduknya terus dijalankan, dengan harapan semakin terbantunya kebutuhan masyarakat pada masa tersebut negara akan menopang pula kualitas hidup masyarakatnya. namun hal tersebut mengalami penolakan dimana belanja pemerintah terhadap aset yang dibeli tidak meningkatkan yang termasuk dalam dimensi Indeks Pembangunan Manusia nya, dengan begitu semakin tinggi belanja modal yang dikeluarkan pemerintah pada masa tersebut akan menekan kualitas dimensi Indeks Pembangunan Manusia yang ada.

Tidak dapat dihindari pengalokasian dana Belanja Modal yang tidak merata ini dapat mempengaruhi kualitas IPM-nya, dengan kata lain apabila Belanja Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi tidak dapat dialokasikan secara merata dan tepat guna, maka akan membawa menurun nya indeks pengembangan manusia.

4.4.3 Pengaruh Jumlah Penduduk (Demografi) Terhadap Indeks

Pembangunan Manusia.

Jumlah penduduk di setiap wilayah di Indonesia tentu akan membawa pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan yang ada. Pada penelitian ini jumlah penduduk membawa pengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Tingginya jumlah penduduk di Indonesia membawa banyak pengaruh baik positif maupun negatif, tingginya nilai kelahiran di Indonesia yang tidak diimbangi dengan meningkatnya kualitas pendidikan serta kesejahteraan masyarakat akan membawa dampak buruk bagi masyarakatnya, terutama pada indeks pembangunan manusia. Hal ini sesuai dengan penelitian (Kiha, Seran, & Lau, 2021) dimana jumlah penduduk memiliki pengaruh ketat terhadap tingkat IPMnya. Angka kelahiran serta jumlah penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi dasar dalam aspek kehidupan sosial di Indonesia, fasilitas kesehatan juga mengalami kesulitan dalam pelayanan terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat, meningkatnya jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan aspek tersebut akan memicu tingginya nilai pengangguran serta rendahnya angka kesejahteraan dimana apabila aspek tersebut tidak terpenuhi dengan baik akibat banyaknya penduduk maka akan mempengaruhi pula pada aspek ekonominya.

Kualitas penduduk dapat meningkat apabila segala aspek kebutuhan penduduk dapat terpenuhi dengan baik, dimana kualitas penduduk juga menjadi potensi ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebagai aset yang

berpengaruh apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keterampilan maka dapat meningkatkan produksi nasional serta indeks pembangunan manusia yang ada. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika persebaran dan mutunya sedemikian rupa tidak mengalami peningkatan sehingga hanya menuntut layanan sosial dan tingkat produksinya yang rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Devita, Andri, Delis, & Junaidi, 2015). Hal ini menandakan Jumlah Penduduk apabila semakin besar maka akan berpotensi menurunkan nilai IPM apabila tidak diimbangi dengan meningkatnya nilai kualitas penduduk tersebut.

4.4.4 Pengaruh Ketinggian Wilayah (Topologi) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ketinggian wilayah tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Kondisi geografis dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan dengan masing masing nilai yaitu 01, 02, dan 03. Kondisi dalam ketinggian wilayah tersebut menimbulkan banyak perbedaan perkembangan, dimana semakin tinggi nilai kondisi topologi maka makin semakin rendah pula IPMnya. Kondisi ekonomi serta sosial budaya yang tumbuh di setiap wilayah dikembangkan oleh masyarakatnya tersendiri, mereka akan menciptakan aktifitas sosial serta ekonomi dengan corak nya tersendiri, kondisi tersebut membuktikan bahwa wilayah dengan nilai semakin tinggi akan menurunkan kualitas IPMnya, sebagaimana wilayah dengan ketinggian wilayah pada daerah Gunung/Pegunungan

dalam kehidupan sosial, ekonomi serta sarana pendidikannya akan berpotensi mengalami keterbatasan akses, wilayah dataran rendah-tinggi (menengah) memiliki akses yang mudah dalam perkembangan aktifitas ekonomi, sosial serta prasarana lainnya, implikasi tersebut sesuai dengan hasil penelitian (Farida, 2013) dengan kesimpulan bahwa secara umum aspek aksesibilitas cenderung mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berkembang. Hal ini mempengaruhi dimensi indeks pembangunan manusia masyarakatnya secara langsung, namun bagaimanapun hal tersebut dapat diatasi dengan kemandirian serta kreatifitas masyarakatnya dalam beraktifitas secara optimal atau bahkan sebaliknya.



BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data analisis diatas, maka penelitian ini berhasil menemukan bahwa:

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah Semakin banyak PAD yang diterima maka berarti semakin besar potensi pemerintahan provinsi dapat dikatakan mandiri. Pengalokasian dana Pendapatan Asli Daerah dapat disalurkan dalam berbagai aspek seperti alokasi Belanja Modal, Tunjangan Program Pemerintah, dan lainnya. Alokasi yang tepat oleh pemerintahan provinsi terhadap penggunaan dana PAD tentu akan memberikan dampak positif bagi perkembangan kualitas penduduknya, pengalokasian terhadap sarana Pendidikan, dan Kesehatan yang ada akan menunjang kehidupan serta kebutuhan pokok masyarakat, Dengan semakin mandirinya suatu daerah provinsi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang ada maka akan meningkatkan kemampuan pemerintahan wilayah tersebut terkait upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menghuni sebagai potensi optimalisasi indeks pembangunan manusia yang ada.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Berarti semakin meningkatnya anggaran Belanja Modal akan menurunkan kualitas IPM yang ada. implikasi dari hasil

penelitian ini adalah alokasi pemerintah yang terfokus pada salah satu dimensi pada masa tersebut akan mempengaruhi kualitas aspek lainya, dan hal tersebut tidak dibarengi dengan meningkatnya IPM namun sebaliknya. Semakin besar dana alokasi pemerintah dalam Belanja Modal apabila tidak di barengi dengan meningkatnya kualitas penduduknya maka hanya dapat bertopang pada pemerintah sebagai beban, sehingga kualitas pembangunan manusia akan stuck bahkan memburuk.

3. Hasil dari penelitian ini mengenai kondisi topologi/ketinggian wilayah berpengaruh terhadap IPM, sedangkan kondisi demografi/jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM, dimana semakin tinggi wilayah dan sulitnya keterjangkauan akses wilayah maka akan menimbulkan keterbatasan akses pada pengembangan dimensi terkait IPM pada setiap wilayah provinsi, hal tersebut mempengaruhi indeks pembangunan manusia masyarakatnya secara langsung, namun tergantung bagaimana keberagaman kondisi tersebut dapat disiasati dengan optimal atau bahkan sebaliknya. Sedangkan jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika persebaran dan mutunya sedemikian rupa tidak mengalami peningkatan sehingga hanya menuntut layanan sosial dan tingkat produksinya yang rendah. Hal ini menandakan Jumlah Penduduk apabila semakin besar maka akan berpotensi menurunkan nilai IPM apabila tidak di imbangi dengan meningkatnya nilai kualitas penduduk tersebut.

5.2 Manfaat Penelitian

1. Hasil olah data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah provinsi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah yang baik dan optimal akan meningkatkan kualitas IPM yang ada. Setiap pemerintah provinsi dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan alokasi PAD secara optimal agar menopang kesejahteraan penduduknya melalui program pemerintah baik sosial maupun program pemberdayaan dengan tujuan sesuai dengan apa yang ditargetkan sesuai pemerintah provinsinya.
2. Pendekatan pengeluaran terkait Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah semestinya memiliki nilai target yang sesuai dengan apa yang ditujukan pada visi misi suatu program yang dibuat oleh pemerintah sebagai implementasi dalam upaya pemerintah untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, sehingga nilai pembangunan yang ada dapat berkembang secara optimal.
3. Persebaran penduduk serta upaya peningkatan kualitas SDM yang ada semestinya menjadi tugas penting bagi pemerintah, dimana dapat dikatakan masyarakat menjadi aset penting dalam berjalanya suatu pemerintahan. Pemerataan jumlah penduduk serta pengendalian tingginya angka kelahiran serta angka pernikahan dini semestinya dapat di atasi sehingga pemerintah dapat memiliki fokus pada penduduk usia produktif sebagai upaya peningkatan indeks pembangunan manusia yang ada.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penulisan penelitian ini tidak memperhitungkan karakteristik kualitatif laporan keuangan dan hanya menggunakan sampel yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Meskipun web yang digunakan adalah web dan data resmi, namun penulis tidak dapat memberikan penilaian terhadap karakteristik laporan keuangan masing-masing pemerintah provinsi apabila data yang diambil merupakan data yang diunggah pada website terkait laporan.

5.4 Saran

1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperoleh sampel langsung dari pemerintah provinsi dengan memperhatikan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Ini akan membuat data yang diperoleh lebih menyeluruh dan meningkatkan penelitian.
2. Untuk meningkatkan penelitian, diharapkan penambahan variabel aspek keuangan seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Program Pemerintah, dan lain-lain akan ditambahkan pada aspek non keuangan seperti pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah daerah, pola kepemimpinan gubernur , dan/atau faktor potensial lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B. (2006). *Menanti kemakmuran negeri: kumpulan esai tentang pembangunan sosial ekonomi indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- abdullah, S., & Hallim, A. (2006). Studi atas belanja modal pada anggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan belanja pemeliharaan dan sumber pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2, 17-32.
- Afifanda, D. (2017). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Alexiou, C. (2009). Government spending and economic growth: Econometric evidence from the South Eastern Europe (SEE). *Journal of economics and social research*, 11.
- Ardhini. (2011). "Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik dalam perspektif teori keagenan (studi pada kabupaten dan kota di jawa tengah). *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- Ardiansyah, V. A., & Widyaningsih. (2014). Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2012-2014). *Simposium Nasional Akuntansi* 17.
- Asmuruf, M. (2015).). Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15.
- Bastian, I. (2002). *AKuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Bintarto, R. (1977). *Geografi Kota* (cetakan pertama ed.). Yogyakarta: Spring.
- Devita, Andri, A., Delis, & Junaidi. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal perspekti pembangunan pembiayaan dan pembangunan daerah*, 63-70.

- Devita, Andri, A., Delis, & Junaidi. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 63-70.
- Farida, U. (2013). Pengaruh aksesibilitas terhadap karakteristik sosial ekonomi masyarakat pedesaan Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. *Jurnal wilayah dan Lingkungan*, 49-66.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Hairiyah, H., Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2018). Pengaruh dana alokasi umum DAU dana alokasi khusus DAK dan pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja modal. *Kinerja*, 85-91.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah* (edisi ketiga ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal akuntansi pemerintah*, 53-64.
- Hutapea, T. D., Kurniawan, R., & Hanggoro, W. (2015). Pengaruh Topografi dan Luas Daratan Model WRF terhadap Hasil Prediksi Temperatur Permukaan Di Wilayah Kepulauan Indonesia. *Jurnal Meteorologi dan Geofisika*, 16.
- Kiha, E. K., Seran, E. S., & Lau, H. T. (2021). Pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (ipm) di kabupaten belu. *Jurnal Ekonomi Sosial dan Humaniora*, 60-84.
- Lugastoro, D. P. (2013). Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1-20.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mawarni, D., & Abdullah, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal AKuntansi ISSN*, 2302, 0164.

- Mayasari, L. P., Sinarwati, N. K., Yuniarta, G. A., & AK, S. (2014). Pengaruh Pertumbuhan EKonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana ALokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 2.
- Nugraheni, I. L. (2020). PENGARUH KEMISKINANTERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI LAMPUNG. *JURNAL PENELITIAN GEOGRAFI*, 8, 28-34.
- Pamungkas, B. (2019). kebahagiaan penduduk provinsi jawa barat. *JISPO-Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*, 188-197.
- Pemendagri. (2006). Indonesia.
- pemendagri. (2006). *Paten No. 26*. Indonesia.
- Santoso, B. (1995). *Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Pasar Kabupaten di Sleman*. (Vol. 4). Yogyakarta: Prisma.
- Sari, I. A., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 3, 15.
- Sarkoro, H. (2016). Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2012-2014). *Doctoral dissertation, Universitas Muhamadiyah Surakarta*.
- Setyowati, L., & Suparwati, Y. K. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Prestas*, 9.
- Sidik, M. (2002). *Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah*. Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung.
- Sinambela, E., & Ana, K. R. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 16.
- Sriningsih, D. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Pertumbuhan

Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Surakarta tahun 2003-2011. *Doctoral dissertation, UMS.*

Sriyana, J. (2011). Disparitas Fiskal Antar Desa DI Profinsi Jawa tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 56-66.

Subandi. (2008). *Ekonomi Pembangunan. Bandung*. Bandung: Alfabeta.

Sudarsono, A. (2016). Jaringan Syaraf Tiruan Untuk Memprediksi Laju Pertumbuhan Penduduk Menggunakan Metode Bacpropagation (Studi Kasus Di Kota Bengkulu). *Jurnal Media Infotama*, 12.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA.

Suhanda. (1995). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Padang: Andalas Lima Sisi.

Suhanda. (2007). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Padang: Andalas Lima Sisi.

Suhardin, Y. (2007). Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25.

Suharyono, & Amin, M. (1994). Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Depdikbud. *Pengantar Filsafat Geografi*.

Undang, U. (2004). *Paten No. 33*. Republik Indonesia.

Wijaya, T. (2007). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pembangunan pada Kabupaten/Kota Daerah istimewa*. Yogyakarta.

Wijayanti, N. K., & Darsana, I. B. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2008-2013). *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 44573.

Zufaldhly, Z. (2018). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SUMATERA BARAT. *Jurnal Akuntansi*.

LAMPIRAN
lampiran 1 DATA SAMPEL

Provinsi di Indonesia	
1	Aceh
2	Sumatera Utara
3	Sumatera Barat
4	Riau
5	Kep. Riau
6	Jambi
7	Sumatera Selatan
8	Kep. Bangka Belitung
9	Bengkulu
10	Lampung
11	DKI Jakarta
12	Jawa Barat
13	Banten
14	Jawa Tengah
15	DI Yogyakarta
16	Jawa Timur
17	Kalimantan Barat
18	Kalimantan Tengah
19	Kalimantan Selatan
20	Kalimantan Timur
21	Kalimantan Utara
22	Sulawesi Utara
23	Gorontalo
24	Sulawesi Tengah
25	Sulawesi Selatan
26	Sulawesi Barat
27	Sulawesi Tenggara
2	Bali
29	Nusa Tenggara Barat
30	Nusa Tenggara Timur
31	Maluku
32	Maluku Utara
33	Papua Barat
34	Papua

lampiran 2
DATA PENELITIAN

2019		PAD	BM	demografi	topografi	IPM
1	Aceh	5549,65	8743,71	5372000	Dataran Tinggi	71,9
2	Sumatera Utara	11312,41	9604,46	14563000	Dataran Tinggi	71,74
3	Sumatera Barat	4426,44	5232,86	5441000	Dataran Rendah	71,24
4	Riau	6176,29	6202,05	6972000	Dataran Rendah	71,79
5	Kep. Riau	6176,29	6202,05	2190000	Dataran Rendah	75,48
6	Jambi	2949,17	4513,78	3625000	Dataran Rendah	69,99
7	Sumatera Selatan	6645,69	10348,29	8471000	Dataran Rendah	70,02
8	Kep. Bangka Belitung	1634,94	1821,6	1489000	Dataran Rendah	71,3
9	Bengkulu	1527,82	2467,32	1992000	Dataran Tinggi	71,21
10	Lampung	5086,19	4528,49	8448000	Dataran Rendah	69,57
11	DKI Jakarta	45707,4	11551,93	10558000	Dataran Rendah	80,76
12	Jawa Barat	44150,91	19634,12	49317000	Dataran Rendah	72,03
13	Banten	15763,02	6871,9	12927000	Dataran Rendah	72,44
14	Jawa Tengah	28648,04	15513,38	34718000	Dataran Rendah	71,73
15	DI Yogyakarta	4742,51	3066,6	3843000	Dataran Rendah	79,99
16	Jawa Timur	39344,6	21119,9	39699000	Dataran Rendah	71,5
17	Kalimantan Barat	4179,91	5091,94	5069000	Dataran Rendah	67,65
18	Kalimantan Tengah	3212,11	4840,84	2715000	Dataran Rendah	70,91

19	Kalimantan Selatan	5650,04	5789,96	4244000	Dataran Rendah	70,72
20	Kalimantan Timur	9573,63	9344,15	3721000	Dataran Tinggi	76,61
21	Kalimantan Utara	1057,17	1538,01	742000	Dataran Tinggi	71,15
22	Sulawesi Utara	2380,36	3268,38	2507000	Dataran Tinggi	72,99
23	Gorontalo	1047,31	1338,82	1203000	Dataran Tinggi	68,49
24	Sulawesi Tengah	2475,59	4273,37	3054000	Dataran Tinggi	69,5
25	Sulawesi Selatan	8774,01	7824,08	8851000	Dataran Tinggi	71,66
26	Sulawesi Barat	773,57	1834,57	1380000	Dataran Tinggi	65,73
27	Sulawesi Tenggara	2063,34	5241,62	2705000	Dataran Tinggi	71,2
2	Bali	12305,57	3038,86	4337000	Dataran Rendah	75,38
29	Nusa Tenggara Barat	3598,01	4098,16	5070000	Dataran Rendah	68,14
30	Nusa Tenggara Timur	2844,07	5292,96	5456000	Dataran Tinggi	65,23
31	Maluku	1045,21	2842,29	1803000	Dataran Rendah	69,45
32	Maluku Utara	990,26	3194,09	1256000	Dataran Tinggi	68,7
33	Papua Barat	1096,24	6223,66	3379000	Gunung (Pegunungan)	64,7
34	Papua	3496,50	9839,85	960000	Gunung (Pegunungan)	60,84

2020		PAD	BM	demografi	topografi	IPM
1	Aceh	5454,08	6395,57	5275000	Dataran Tinggi	71,99
2	Sumatera Utara	10608,31	7117,9	14799000	Dataran Tinggi	71,77
3	Sumatera Barat	4272,14	3519,43	5534000	Dataran Rendah	72,38
4	Riau	5889,53	4459,02	6394000	Dataran Rendah	72,71
5	Kep. Riau	2913,59	1843,84	2065000	Dataran Rendah	75,59
6	Jambi	2738,82	3251,13	3548000	Dataran Rendah	71,29
7	Sumatera Selatan	6416,34	8710,39	8467000	Dataran Rendah	70,01
8	Kep. Bangka Belitung	1444,14	1382,12	1456000	Dataran Rendah	71,47
9	Bengkulu	1386,89	1902,41	2011000	Dataran Tinggi	71,4
10	Lampung	4904,17	3513	9008000	Dataran Rendah	69,69
11	DKI Jakarta	37414,75	3173,22	10562000	Dataran Rendah	80,77
12	Jawa Barat	39915,36	14070,13	48274000	Dataran Rendah	72,09
13	Banten	13725,18	4278,88	11905000	Dataran Rendah	72,45
14	Jawa Tengah	28056,37	9914,82	36516000	Dataran Rendah	71,87
15	DI Yogyakarta	4190,37	2289,87	3669000	Dataran Rendah	79,97
16	Jawa Timur	37042,89	14474,64	40666000	Dataran Rendah	71,71
17	Kalimantan Barat	3930,52	3990,55	5414000	Dataran Rendah	67,66
18	Kalimantan Tengah	2944,71	3941,06	2670000	Dataran Rendah	71,05
19	Kalimantan Selatan	5097,73	4126,63	4074000	Dataran Rendah	70,91
20	Kalimantan Timur	7910,85	7477,51	3766000	Dataran Tinggi	76,24

21	Kalimantan Utara	557,65	665,17	702000	Dataran Tinggi	70,63
22	Sulawesi Utara	2054,56	2899,7	2622000	Dataran Tinggi	72,93
23	Gorontalo	983,58	1054,57	1172000	Dataran Tinggi	68,68
24	Sulawesi Tengah	2621,21	3265,28	2986000	Dataran Tinggi	69,55
25	Sulawesi Selatan	8381,14	6811,54	9074000	Dataran Tinggi	71,93
26	Sulawesi Barat	807,73	1420,64	1419000	Dataran Tinggi	66,11
27	Sulawesi Tenggara	2621,21	3265,28	2625000	Dataran Tinggi	71,45
2	Bali	7788,28	2157,82	4317000	Dataran Rendah	75,5
29	Nusa Tenggara Barat	3626,7	2755,42	5320000	Dataran Rendah	68,25
30	Nusa Tenggara Timur	2650,85	4298,75	5326000	Dataran Tinggi	65,19
31	Maluku	1056,12	2428,86	1849000	Dataran Rendah	69,49
32	Maluku Utara	1004,1	2559,09	1283000	Dataran Tinggi	68,49
33	Papua Barat	1069,26	5680,09	1134000	Gunung (Pegunungan)	65,09
34	Papua	2711,06	6401,15	4304000	Gunung (Pegunungan)	60,44

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

2021		PAD	BM	demografi	topografi	IPM
1	Aceh	5191,46	6687,77	5334000	Dataran Tinggi	72,18
2	Sumatera Utara	12061,87	7371,71	14936000	Dataran Tinggi	72
3	Sumatera Barat	4679,17	3237,2	5580000	Dataran Rendah	72,65
4	Riau	6960,76	4331,27	6494000	Dataran Rendah	72,94
5	Kep. Riau	3393,25	1783,65	2118000	Dataran Rendah	75,79
6	Jambi	3276,62	3186,3	3585000	Dataran Rendah	71,63
7	Sumatera Selatan	7159,95	9039,18	8551000	Dataran Rendah	70,24
8	Kep. Bangka Belitung	1726,92	1370,34	1473000	Dataran Rendah	71,69
9	Bengkulu	1614,88	1578,39	2033000	Dataran Tinggi	71,64
10	Lampung	5552,58	3812,11	9082000	Dataran Rendah	69,9
11	DKI Jakarta	41606,31	6865,83	10610000	Dataran Rendah	81,11
12	Jawa Barat	45351,78	15530,13	48782000	Dataran Rendah	72,45
13	Banten	15672,7	5311,57	12061000	Dataran Rendah	72,72
14	Jawa Tengah	31611,2	11376,72	36743000	Dataran Rendah	72,16
15	DI Yogyakarta	4337,92	2037,65	3713000	Dataran Rendah	80,22
16	Jawa Timur	40942,41	14922,09	40879000	Dataran Rendah	72,14
17	Kalimantan Barat	4473,69	4670,5	5471000	Dataran Rendah	67,9
18	Kalimantan Tengah	3931,79	3810,78	27020000	Dataran Rendah	71,25
19	Kalimantan Selatan	6065,52	4400,78	4123000	Dataran Rendah	71,28
20	Kalimantan Timur	9451,12	7428,35	3808000	Dataran Tinggi	76,88

21	Kalimantan Utara	1264,98	1240,56	714000	Dataran Tinggi	71,19
22	Sulawesi Utara	2309,72	2760,88	2639000	Dataran Tinggi	73,3
23	Gorontalo	1175,5	1200,41	1181000	Dataran Tinggi	69
24	Sulawesi Tengah	3190,32	2866,09	3022000	Dataran Tinggi	69,79
25	Sulawesi Selatan	8812,95	6618,84	9140000	Dataran Tinggi	72,24
26	Sulawesi Barat	904,08	1339,13	1437000	Dataran Tinggi	66,36
27	Sulawesi Tenggara	2552,78	5181,78	2659000	Dataran Tinggi	71,66
2	Bali	7699,98	2576,89	4363000	Dataran Rendah	75,69
29	Nusa Tenggara Barat	3872,41	2797,22	5390000	Dataran Rendah	68,65
30	Nusa Tenggara Timur	2734,28	4044,27	5388000	Dataran Tinggi	65,28
31	Maluku	1107,7	2825,19	1863000	Dataran Rendah	69,71
32	Maluku Utara	1132,1	2868,31	1299000	Dataran Tinggi	68,76
33	Papua Barat	1098,87	5218,39	1157000	Gunung (Pegunungan)	65,26
34	Papua	4092,23	7063,85	4355000	Gunung (Pegunungan)	60,62

Provinsi	L(n) PAD			L(n) BM		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Aceh	8,62	8,6	8,55	9,08	8,76	8,81
Sumatera Utara	9,33	9,27	9,4	9,17	8,87	8,91
Sumatera Barat	8,4	8,36	8,45	8,56	8,17	8,08
Riau	8,73	8,68	8,85	8,73	8,4	8,37
Kep. Riau	8,73	7,98	8,13	8,73	7,52	7,49
Jambi	7,99	7,92	8,09	8,41	8,09	8,07
Sumatera Selatan	8,8	8,77	8,88	9,24	9,07	9,11

Kep. Bangka Belitung	7,4	7,28	7,45	7,51	7,23	7,22
Bengkulu	7,33	7,23	7,39	7,81	7,55	7,36
Lampung	8,53	8,5	8,62	8,42	8,16	8,25
DKI Jakarta	10,73	10,53	10,64	9,35	8,06	8,83
Jawa Barat	10,7	10,59	10,72	9,89	9,55	9,65
Banten	9,67	9,53	9,66	8,84	8,36	8,58
Jawa Tengah	10,26	10,24	10,36	9,65	9,2	9,34
DI Yogyakarta	8,46	8,34	8,38	8,03	7,74	7,62
Jawa Timur	10,58	10,52	10,62	9,96	9,58	9,61
Kalimantan Barat	8,34	8,28	8,41	8,54	8,29	8,45
Kalimantan Tengah	8,07	7,99	8,28	8,48	8,28	8,25
Kalimantan Selatan	8,64	8,54	8,71	8,66	8,33	8,39
Kalimantan Timur	9,17	8,98	9,15	9,14	8,92	8,91
Kalimantan Utara	6,96	6,32	7,14	7,34	6,5	7,12
Sulawesi Utara	7,78	7,63	7,74	8,09	7,97	7,92
Gorontalo	6,95	6,89	7,07	7,2	6,96	7,09
Sulawesi Tengah	7,81	7,87	8,07	8,36	8,09	7,96
Sulawesi Selatan	9,08	9,03	9,08	8,96	8,83	8,8
Sulawesi Barat	6,65	6,69	6,81	7,51	7,26	7,2
Sulawesi Tenggara	7,63	7,87	7,84	8,56	8,09	8,55
Bali	9,42	8,96	8,95	8,02	7,68	7,85
Nusa Tenggara Barat	8,19	8,2	8,26	8,32	7,92	7,94
Nusa Tenggara Timur	7,95	7,88	7,91	8,57	8,37	8,31
Maluku	6,95	6,96	7,01	7,95	7,8	7,95
Maluku Utara	6,9	6,91	7,03	8,07	7,85	7,96
Papua Barat	7	6,97	7	8,74	8,64	8,56
Papua	8,16	7,91	8,32	9,19	8,76	8,86

lampiran 3
HASIL OLAH DATA 3

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Demo, Topo, LNX2, LNX1 ^b		. Enter

a. Dependent Variable: IPM

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,749 ^a	,561	,542	2,62273	2,126

a. Predictors: (Constant), Demo, Topo, LNX2, LNX1

b. Dependent Variable: IPM

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	850,944	4	212,736	30,927	,000 ^b
	Residual	667,234	97	6,879		
	Total	1518,178	101			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), Demo, Topo, LNX2, LNX1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF

1	Constant	67,524	4,134		16,332	,000		
	LN1	4,129	,505	1,168	8,177	,000	,222	4,501
	LN2	-3,410	,675	-,614	-5,048	,000	,306	3,267
	Topo	-,988	,543	-,155	-1,818	,072	,621	1,609
	Demo	-1,315E-7	,000	-,384	-3,643	,000	,408	2,454

a. Dependent Variable: IPM

